

Jamal - Satu Dekade

by Diyah Pujiati

Submission date: 21-Jul-2023 12:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134414711

File name: Jamal_-_Satu_Dekade.pdf (548.9K)

Word count: 3721

Character count: 24659

1 SATU DEKADE INVESTIGASI *INTERLOCKING DIRECTORATE*: SEBUAH MODEL DETEKSI PRAKTIK MONOPOLI?

Nurmala Ahmar
Diyah Pujiati
Joicenda Nahumury

1 **Abstrak: Satu Dekade Investigasi *Interlocking Directorate*: Sebuah Model Deteksi Praktik Monopoli?** Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi interaksi antar perusahaan melalui jaringan dewan direksi dan komisaris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *interlock directorate*. Kami menginvestigasi rangkap jabatan selama lebih dari 10 tahun. Selain itu akses mengenai *interlock directorate* bersumber dari www.interlockdirectorate.com. Hasil penelitian menunjukkan terdapat rangkap jabatan dalam kurun waktu dua hingga tujuh tahun. Lebih dari 49% dewan direksi dan komisaris perusahaan public di Indonesia melakukan rangkap jabatan. Informasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk deteksi awal praktik monopoli di Indonesia.

Abstract: A Decade of *Interlocking Directorate* Investigations: A Model for Detecting Monopolistic Practices? This article aims to investigate interactions between companies through a network of boards of directors and commissioners. This research was conducted using the *interlock directorate* approach. We investigated multiple positions for more than 10 years. In addition, access to the *interlock directorate* is sourced from www.interlockdirectorate.com. The results of the study show that there are multiple positions within a period of two to seven years. More than 49% of the boards of directors and commissioners of public companies in Indonesia hold multiple positions. It is hoped that this information can be used for early detection of monopoly practices in Indonesia.

Kata kunci: *interlocking directorate, monopolistic detection, duality position.*

Interlocking directorate terjadi ketika seseorang berafiliasi dengan salah satu organisasi yang juga bersamaan menjadi dewan direksi di organisasi yang lain (Mizruchi 1996). Semua aspek yang berhubungan dengan interlocking memiliki implikasi penting bagi struktur dan efektivitas fungsi dewan perusahaan. Pada akhirnya dewan perusahaan memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan (Hermalin dan Weisbach 2003). Penelitian Phan et al. (2003) menyatakan bahwa rendahnya standard tata kelola perusahaan dan lemahnya penegakan hukum yang ada di Negara berkembang mengakibatkan krisis serta ketidakmampuan perusahaan pulih dari masa krisis tersebut. Interlocking directorate dapat menjadi pendekatan utama utama banyak perusahaan untuk

mencegah ketidakpastian lingkungan (Au et al. 2000).

Interlocking directorate ditangarai dapat membuka peluang pelanggaran undang-undang anti monopoli. Hal ini dibuktikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini memutuskan bahwa ada pelanggaran Pasal 26 UU Antimonopoli pada kasus No. 1/KPPU/L/2003 antara PT Garuda dan PT Abacus. KPPU menemukan interlocking directorate oleh dua direksi PT Garuda yang juga memiliki posisi dewan direksi di PT Abacus dimana kedua perusahaan tersebut berafiliasi induk dengan anak (hubungan vertical). PT Garuda adalah penyedia jasa transportasi udara dan PT Abacus penyedia system reservasi terkomputerisasi. CSR (Computerized Reservation System) adalah system

reservasi atau persediaan kursi data yang terhubung secara online dengan system pemesanan penerbangan. Hubungan vertical antara PT Garuda dan PT Abacus merupakan hubungan kerja yang terikat secara eksklusif dengan adanya kebijakan bahwa CRS Abacus merupakan satu-satunya system reservasi PT Garuda. Kerja sama eksklusif antara dua perusahaan merugikan agen perjalanan lain yang menggunakan CSR selain Abacus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2010). Adam dan Mehran (2012) berpendapat bahwa *interlocking directorate* hanya dilarang jika melanggar larangan yang diatur dalam UU Antimonopoli. Penilaian terhadap pelanggaran tersebut saling tunduk pada persetujuan dari KPPU. Lembaga inilah yang memutuskan apakah *interlocking directorate* akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan menciptakan praktek monopoli. *Interlocking* merupakan situasi di mana orang yang sama menduduki posisi dewan komisaris dan atau dewan direksi (*boards*) lebih dari satu perusahaan (De, 2003). Penelitian Donato & Tiscini (2009) *interlocking directorate* merupakan salah satu cara yang dapat membantu mengurangi asimetri informasi (Mariolis, 1975). Fungsinya adalah untuk memantau debitur dengan menawarkan akses ke informasi internal. Adapun teori *interlocking directorates* berdasarkan penelitian Phan, Lee, & Lau (2003), yaitu *Interlocking directorates for class integration* (kelas penggabungan) dan *Interlocking directorates to reduce uncertainty*.

Interlocking directorates for class integration (kelas penggabungan) didefinisikan sebagai perlindungan timbal balik antara kepentingan kelas social dengan anggotanya (Andre, et al. 2012, Gonzales-Bailon et al. 2012, Adam dan Mehran 2012). Proses ini didorong oleh identifikasi dan pengangkatan calon direksi dengan latar belakang, karakteristik, dan keyakinan politik yang samadari dalam jaringan pribadi anggota dewan sebelumnya yang pernah/sedang

menjabat. Kedua, *Interlocking directorates to reduce uncertainty* merupakan *interlock* yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian namun meminimalkan resiko ketergantungan, seperti perampokan, dengan mengkooptasi organisasi partner di tingkat dewan (Chang-chong et al. 2006). Mahdi, et al (2011) mengidentifikasi empat model tertentu yang dapat menjelaskan bagaimana pengaruh *interlocking* terhadap kinerja perusahaan, yaitu: (1) *The management control model*, merendahkan atau mengabaikan peran *interlocks board* dan struktur dewan lain dan menekankan bahwa manajer mengambil keputusan yang paling penting dan dengan demikian tidak terpengaruh oleh pendapat dewan, (2) *The reciprocity model* (timbal balik), berfungsi ketika dua atau lebih perusahaan bekerja sama dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama dengan *interlocking directorate* menjadi salah satu cara di mana model ini ditimbulkan, (3) *The finance control model*, para pendukung model ini bertentangan dengan Berle dan Means (1932) dengan paradigma perusahaan independen yang lebih bergantung pada kapasitasnya sendiri untuk tumbuh dan berkembang, perusahaan tergantung pada jaringan padat/rapat dari hubungan *intercorporate*, terutama dengan lembaga keuangan mereka yang merupakan penyedia utama keuangan, (4) *The class hegemony model, interlocking directorate* lebih mengupayakan/menjamin untuk memastikan kooptasi dan kerjasama antar-organisasi yang elit (Patrick, 1974) dari apa pun sehingga “melekat secara social (*socially embedded*)”. Hasil dari “class hegemony” adalah sebuah kelas elit dari direksi yang berinteraksi utama di ruang rapat untuk melayani tujuan melindungi kesejahteraan individu kelas atas (Andre, et al. 2012, Gonzales-Bailon et al. 2012, Adam dan Mehran 2012).

Beberapa penelitian mengenai *interlocking directorate* terhadap kinerja perusahaan. Sanches dan Barrozo-Caztro

(2015) meneliti tentang pengaruh *interlocking board* dan *firm performance* untuk 101 perusahaan-perusahaan besar di Belanda dengan menggunakan *new panel database*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *interlocks* memiliki pengaruh negative terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan pengaruh dari *interlocking directors* yang membuat dewan menjadi terlalu sibuk dan karena adanya homogenitas/keseragaman kelas sosial yang cenderung hanya pada masyarakat strata sosial kelas atas. Sementara, penelitian Phan, Lee, & Lau (2003) memiliki tujuan untuk mengetahui kegunaan dari *interlocking directorate* antara perusahaan dengan pemerintah di negara berkembang. Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara *interlock* dan kinerja perusahaan dan hal ini bertentangan dengan kebijaksanaan saat ini dari teori keagenan, yang berpendapat bahwa *interlock* hanya berfungsi untuk manajemen yang berkubu (Braam dan Borghams 2014). Terdapat lima faktor penentu *interlocking directorate* yang ditemukan pada penelitian Dooley (1969), ukuran perusahaan, perluasan pengawasan manajerial, hubungan financial perusahaan, hubungan dengan kompetitor dan eksistensi pada kepentingan ekonomi. Terdapat dua alasan utama lain terkait *interlocking* yakni motif pertukaran informasi (*the information exchange motive*) dan motif control (*control motive*). Motif pertukaran informasi mengacu pada berbagi informasi penting yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru, rahasia dagang dan praktek antara perusahaan yang merupakan pihak dalam *interlock*, yang bisa mengarah pada kinerja yang lebih baik. Sedangkan motif kontrol menunjuk pada keberadaan *interlocks* sebagai perangkat pengendali (De, 2003).

Pertimbangan alasan yang eksplisit dalam pembentukan *interlocks* yang telah ditetapkan yaitu kolusi, kooptasi dan pemantauan, legitimasi, kemajuan karir, dan kohesi sosial. Setiap faktor-faktor

yang mempengaruhi terjadinya *interlocking directorate* memiliki berbagai konsekuensi. Sebagai mekanisme *collusive*, *interlocks* diasumsikan untuk memfasilitasi komunikasi para kompetitor. Sebagai mekanisme *cooptation*, *interlocks* diasumsikan untuk mengamankan sumber daya penyedia manajemen. Sebagai mekanisme *monitoring* diasumsikan dapat memonitoring perusahaan dengan informasi yang diterima selama pengoperasian perusahaan serta pengaruh potensial pada pengoperasian tersebut. Sebagai refleksi kohesi sosial, *interlocks* diasumsikan untuk memfasilitasi kesatuan politis dalam kegiatan politik secara efektif.

Penelitian ini mencoba menciptakan model deteksi praktik monopoli yang didasarkan pada *interlocking directorates* pada jabatan dewan direktur. Riset sebelumnya dilakukan oleh Ahmar (2013) yang melakukan investigasi *interlocking directorates* berdasarkan jabatan dewan direksi. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan sekaligus pelengkap diciptakannya model deteksi praktik monopoli didasarkan pada *interlocking* jabatan dewan direksi.

METODE

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ahmar (2013) terkait model *interlocking directorate* berbasis dewan direksi. Penelitian Ahmar (2013) menghasilkan deteksi rangkap jabatan berbasis dewan direksi. Penelitian ini berfokus pada penyusunan model deteksi praktik monopoli yang didasarkan pada rangkap jabatan dewan direksi pada perusahaan public di Indonesia dengan melihat status *interlocking* perusahaan public. Status ditentukan berdasarkan kesamaan nama dewan direksi antar perusahaan public. Jika ada kesamaan nama maka status perusahaan tersebut adalah *interlock*. Perusahaan yang berstatus *interlock* dapat dideteksi apakah melakukan monopoli ataukah tidak berdasarkan usahanya.

Status ini merupakan deteksi awal sebagai data pendukung atau bukti adanya rangkap jabatan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPPU No. 07 tahun 2009. Status interlock tersebut dapat dijadikan dasar bagi KPPU untuk melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan kriteria lain untuk mendeteksi adanya praktik monopoli. Data penelitian ini berasal dari publikasi dalam bentuk daftar nama dewan direksi dan dewan komisaris tiap perusahaan yang tersedia pada laporan tahunan, ringkasan kinerja perusahaan tercatat atau pada laporan keuangan tahunan selama tahun 2000 hingga 2010 pada idx.co.id.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Mentabulasi status *Interlocking Directorate* di perusahaan j pada tahun t berdasarkan nama-nama dewan direksi yang telah ditabulasi per tahun, apabila terdapat nama yang sama menjabat sebagai dewan direksi di dua atau lebih perusahaan yang berbeda maka nama-nama tersebut mewakili perusahaan yang termasuk *Interlocking Directorate*, (2) Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Carbonai dan Di-Bartolommeo 2009). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai (*mean*) (Simoni dan Caiazza 2012), (3) Mendeskripsikan dengan gambar, hubungan dewan direksi antar perusahaan dengan menggunakan software NodeXL. Hubungan tersebut digambarkan berdasarkan perusahaan dan sektor industri, (4) Berdasarkan gambar jaringan hubungan tersebut dilakukan analisis dan kajian berdasarkan perusahaan dan sektor industri.

Hasil ini diharapkan dapat memberikan temuan tentang keterkaitan antar perusahaan dari sisi kesamaan dewan direksi dan hubungan antar sector industry. Status ini merupakan deteksi awal praktik monopoli sebagai data pendukung/bukti adanya jabatan rangkap yang dilarang oleh

Peraturan KPPU No.07 tahun 2009. Status interlock tersebut dapat dijadikan dasar bagi KPPU untuk melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan criteria lain untuk praktik monopoli yang ditetapkan oleh KPPU. Nilai rata-rata skor interlock, diuji dengan bantuan software SPSS. Hasil ini untuk menunjukkan gambaran perkembangan interlock dari tahun ke tahun selama kurun waktu observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil utama penelitian ini adalah database status interlock antar emiten di Bursa Efek Indonesia. Interlock didasarkan pada perangkapan jabatan sebagai dewan komisaris dan dewan direksi. Tahap awal, tabulasi data dewan komisaris dan dewan direksi menghasilkan database berbasis Ms.Excel. Ditemukan 15.545 nama dewan komisaris dan 16.659 nama dewan direksi selama tahun 2000 sampai dengan 2010.

Investigasi terkait status perangkapan jabatan dilakukan dengan teknik analisis jaringan dengan bantuan aplikasi NodeXL. Hal penting yang menjadi syarat agar akurasi jaringan valid adalah bahwa nama yang ditabulasi harus identik. Pemeriksaan konsistensi nama-nama dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan dengan mencocokkannya melalui berbagai sumber. Sumber-sumber yang digunakan yaitu ringkasan kinerja perusahaan yang diterbitkan idx.co.id, laporan tahunan (annual report), dan laman perusahaan.

Peneliti bekerjasama dengan pengembang website (web developer) yang bekerja untuk Bursa Efek Indonesia dalam pengembangan desain website database ini. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam jangka panjang, laman ini mampu memberikan informasi sebagaimana informasi yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia di laman idx.co.id. Alamat web hasil riset dapat diakses di www.interlockdirectorate.com. Laman database difungsikan sebagai media pencari informasi tentang status interlock seluruh emiten yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. Secara detail, informasi yang dapat diperoleh dari laman interlockdirectorate.com adalah sebagai berikut: (1) nama dewan komisaris per emiten dan status interlocknya, (2) nama dewan direksi per emiten dan status interlocknya, (3) status interlock per emiten berdasarkan dewan komisaris, (4) status interlock emiten berdasarkan dewan direksi, (5) nama emiten dengan status interlock, (6) skor interlock per tahun untuk masing-masing emiten berdasarkan rangkap jabatan dewan komisaris, (7) skor interlock per tahun untuk masing-masing emiten berdasarkan rangkap jabatan dewan komisaris, (8) informasi jumlah perangkapan yang melekat pada dewan komisaris, (9) informasi jumlah perangkapan yang melekat pada dewan direksi.

Penelitian untuk melakukan identifikasi terhadap status perangkapan ini membutuhkan waktu yang lama. Keberadaan database ini diharapkan dapat membantu para peneliti melakukan riset yang terkait dengan interlocking directorate di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi prototype untuk menciptakan database sejenis untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di kementerian hukum dan hak azasi manusia (Kumham) sehingga deteksi kepemilikan perusahaan dan posisi dewan komisaris dapat diperoleh dengan mudah. Pada penelitian ini desain database dibuat dinamis, sehingga ketika data *diupdate*

maka informasi yang ditampilkan berubah. Desain program untuk hal tersebut sepenuhnya dilakukan oleh *web-developer* dengan bahasa program ahli teknologi informasi. Peneliti menyediakan logika dan sajian datanya. Pengecekan kebenaran dilakukan dengan membandingkan hasil jaringan dari NodeXL dibandingkan dengan hasil program yang dibuat oleh *web developer*.

Rangkap jabatan dewan komisaris pada penelitian ini tidak dibedakan antara dewan komisaris independen dan bukan independen. Berdasarkan hasil analisis rangkap jabatan dewan komisaris selama 2000-2010 terinvestigasi sebanyak rangkap 2 sampai dengan rangkap 7. Dewan komisaris yang merangkap jabatan pada 2 emitem selama kurun waktu tersebut cenderung naik, tahun 2000 tercatat 80 orang dan tahun 2010 terdokumentasi sejumlah 125 orang. Demikian juga dengan rangkap jabatan untuk 3 emiten sekaligus. Rangkap jabatan 7 mulai ada pada tahun 2010. Personal dan emiten tempat menjabat sebagai dewan komisaris dapat dicari melalui laman web luaran penelitian ini (www.interlockdirectorate.com.) melalui menu "Pencarian Interlock" dan menuliskan nama pada isian nama dewan komisaris dan direksi, Tabel 1 menunjukkan rangkuman jumlah dewan komisaris yang berstatus interlock (rangkap jabatan) per tahun mulai dari rangkap 2 sampai dengan rangkap 7.

Table 1. Interlocking Directorate 2000-2010 Berbasis Dewan Komisaris

Tahun	Jumlah Interlock*)						Jumlah
	2	3	4	5	6	7	
2000	80	16	8	1	1	-	106
2001	80	15	10	1	1	-	107
2002	74	15	7	2	-	-	98
2003	82	17	5	2	-	-	106
2004	81	16	6	2	-	-	105
2005	102	18	4	1	-	-	125
2006	97	19	3	2	-	-	121
2007	119	23	4	1	1	-	148
2008	118	25	3	5	4	-	150
2009	113	25	5	2	2	-	147
2010	125	24	7	3	1	1	161

Investigasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui nama-nama dewan komisaris yang merangkap pada masing-masing posisi. Lampiran 1 menunjukkan daftar nama-nama dewan komisaris dan nama perusahaan (emiten) dimana nama yang bersangkutan menjabat sebagai dewan komisaris.

Pada banyak penelitian interlocking directorate diukur dengan membandingkan jumlah dewan komisaris yang merangkap dengan jumlah total dewan. Hasil tersebut merupakan skor status interlock. (Mazzola, Perrone, & Samuel, 2015; Aduda, Chogii, & Obara Magutu, 2013; Kim & You, 2013; (Saidin, Malek, & Saidin, 2013; Li,

2013; Di, Sapienza, & Luiss, 2015). Berikut adalah rangkuman status skor berbasis dewan komisaris. Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah emiten yang berstatus interlock berbasis dewan komisaris adalah 49.7% dari jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada kecenderungan peningkatan jumlah emiten yang berstatus interlock. Rata-rata skor interlock adalah 0.443 atau hampir separuh emiten yang berstatus in terlock, dewan komisaris yang duduk pada masing-masing emiten hampir setengahnya merangkap jabatan pada perusahaan lain.

Table 2
Rata-rata skor Interlock Tahun 2000-2010 Berbasis Dewan Komisaris

Tahun	Rata-rata Skor	Jumlah Emiten	Jumlah Perush Listing	Persentase Emiten Interlock
2000	0.492	141	278	51%
2001	0.455	145	296	49%
2002	0.469	129	302	43%
2003	0.431	145	309	47%
2004	0.422	153	311	49%
2005	0.432	165	325	51%
2006	0.410	167	333	50%
2007	0.435	186	362	51%
2008	0.442	197	389	51%
2009	0.443	205	399	51%
2010	0.445	227	425	53%
Rata-rata	0.443	-	-	49,7%

Struktur pada perusahaan pada umumnya merupakan hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan seperti yaitu pemegang saham, komisaris, dan direksi. Rangkap jabatan terjadi pula pada posisi dewan direksi. Pada system tata kelola perusahaan dikenal 2 pendekatan system, yaitu one-tier dan two tier (Bischoff & Buchwald, 2015). Sistem one-tier hanya dikenal adanya pimpinan,

namun tidak ada fungsi pengawasan. Pada system two-tier dipisahkan antara pimpinan dan pengawas. Pimpinan masuk pada jajaran dewan direksi, sementara pengawas masuk pada struktur dewan komisaris. Di Indonesia, berdasarkan UU No. 1 tahun 1995, terdapat peraturan bahwa komisaris dan direksi jelas wajib dipisahkan. Penelitian ini melakukan investigasi pula terkait perangkapan pada jabatan/struktur dewan direksi.

Table 3. Interlocking Directorate 2000-2010 Berbasis Dewan Direksi

Tahun	Jumlah Interlock ^{a)}				Jumlah
	2	3	4	5	
2000	43	7	-	-	50
2001	47	9	1	-	57
2002	47	3	1	-	51
2003	45	3	1	-	49
2004	32	1	1	-	34
2005	43	2	-	-	45
2006	45	-	-	1	46
2007	47	7	-	1	55
2008	48	6	-	1	55
2009	47	8	1	-	56
2010	62	8	-	-	70

Tabel 3 menunjukkan rangkuman interlocking directorate berdasarkan dewan direksi. Berdasarkan table tersebut ditemukan bukti bahwa terdapat cukup banyak nama dewan direksi yang merangkap jabatan sebagai direksi di perusahaan lain. Jumlah perangkapan mulai tahun 2000 sampai dengan 2010 ada kecenderungan meningkat. Tercatat tahun 200 sejumlah 50 dewan direksi merangkap

dan tahun 2010 sejumlah 70 nama dewan direksi terdoukentasi merangkap pada perusahaan lain yang *listing* di BEI. Perangkapan jabatan sebagai dewan direksi mencakup rangkap 2 sampai dengan rangkap 5. Rangkap jabatan pada posisi dewan komisaris mayoritas adalah rangkap 2. Berbeda dengan rangkap jabatan sebagai dewan komisaris yang didominasi 2 dan 3 perusahaan.

Tabel 4. Rata-rata skor Interlock Tahun 2000-2010 Berbasis Dewan Direksi

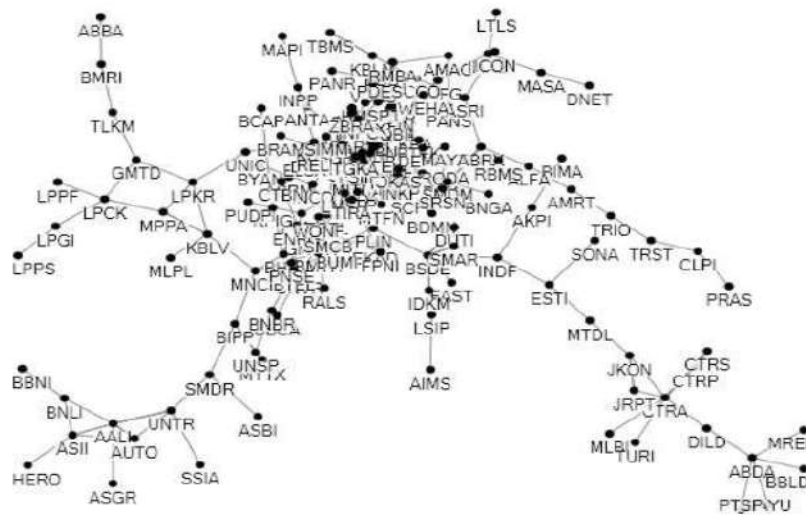
Tahun	Rata-rata Skor	Jumlah Emiten	Jumlah Perush Listing	Persentase Emiten Interlock
2000	0.43	85	278	31%
2001	0.42	92	296	31%
2002	0.41	83	302	27%
2003	0.43	81	309	26%
2004	0.37	83	311	27%
2005	0.40	81	325	25%
2006	0.40	85	333	26%
2007	0.37	98	362	27%
2008	0.41	92	389	24%
2009	0.41	88	399	22%
2010	0.40	113	425	27%
Rata-rata	0.403	-	-	26,5%

Rangkap jabatan pada dasarnya mendominasi kondisi status interlock directorate di Indonesia. Menilik jumlah dewan direksi yang rangkap jabatan dari tahun ke tahun jumlah dewan direksi yang rangkap jabatan konsisten jumlahnya. Kondisi ini dapat diduga ada indikasi bahwa dewan direksi yang rangkap jabatan dimungkinkan dari tahun ke tahun merupakan personal yang sama. Kondisi tahun 2010 justru ada peningkatan yang cukup signifikan secara absolut karena terdapat pertumbuhan jumlah emiten yang berstatus sebesar 25%. Penguasaan sektor bisnis dan ekonomi besar ditengarai dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Kondisi ini didukung oleh status interlock rangkap 3 yang terinvestigasi cukup banyak. Hal yang sama ditemukan pada status interlock berbasis dewan direksi. Tahun terakhir investigasi menunjukkan peningkatan jumlah emiten yang memiliki dewan komisaris rangkap jabatan. Mengkaji hasil investigasi yang secara konsisten tidak banyak berubah selama 10 tahun lebih, peneliti berpendapat bahwa tidak mudah untuk menghilangkan penguasaan ekonomi oleh pihak-pihak

tertentu. Mereka telah lama berkiprah dalam bidang tersebut.

Hasil investigasi menunjukkan bukti bahwa 26,5% dewan direksi emiten di BEI melakukan rangkap jabatan pada tahun 2000-2010. Adapun perbandingan jumlah dewan direksi yang merangkap jabatan dibandingkan dengan total jumlah dewan komisaris secara rata-rata ditemukan sejumlah 40,3% atau 2:5, artinya pada rata-rata 5 jabatan direksi di perusahaan, 2 diantara mereka merangkap menjadi direksi di perusahaan/emiten lain. Tahun 2003 dan 2000, tercatat skor tertinggi untuk rangkap jabatan dewan direksi.

Sedikit berbeda dengan posisi dewan komisaris, dimana tahun 2000 dan 2002 tercatat skor tertinggi perangkapn. Sementara jika dilihat dari perkembangannya jumlah emiten yang terdaftar di BEI tercatat mengalami peningkatan per tahun rata-rata 4% per tahun. Tahun 2010 dihitung pertumbuhan jumlah emiten di pasar modal adalah 7% $((425-399)/399)$. Pertambahan jumlah emiten di pasar modal sepuluh tahun terakhir rata-rata 14 emiten baru masuk di BEI.



Bukti empiris dampak interlocking directorate belum banyak ditemukan di Indonesia. Nugroho dan Eko (2011) menemukan adanya pengaruh rangkap jabatan terhadap manajemen laba. Temuan di beberapa negara kondisi interlock tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan (Sanchez dan Barroso-Castro 2015, Adams dan Mehran 2012, Pombo dan Guterrez 2011, Thorgren et al. 2010), nilai perusahaan (Omer et al. 2014), kompensasi manajemen (Wong et al. 2015), modal privat (Stuart dan Yim 2010), tingkat pengungkapan laporan keuangan (Cai et al. 2014). Database ini diharapkan dapat memberikan kontribusi optimum terkait perkembangan riset tentang interlocking. Hal ini dikarenakan data kualitatif serta status interlock terpublikasi baik oleh institusi pasar modal maupun institusi lain untuk mendeteksi perangkapan jabatan belum ada. Status interlock nama jajaran dewan komisaris maupun direksi harus ditelusuri satu per satu. Penelitian ini membutuhkan software network analysis dengan NodeXL. Ada beberapa alternative software network analysis untuk riset social. Akan lebih baik, penelitian yang akan datang menggunakan softaware alternative lain untuk memperkaya teknik menentukan jaringan antar perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Diskusi secara intensif dengan KPPU merupakan tambahan kegiatan berdasarkan perkembangan nilai kemanfaatan hasil penelitian. Kegiatan ini membutuhkan upaya optimum karena peneliti dan sebagian besar akademisi tidak banyak terlibat dalam kegiatan KPPU. Kriteria praktik monopoli tidak hanya didasarkan ada rangkap jabatan dewan komisaris atau direksi, oleh karenanya model interlock yang dihasilkan pada riset ini bukan satu-satunya pengukur praktik monopoli.

Beberapa penelitian tentang interlocking directorate terhadap kinerja perusahaan yang meneliti tentang pengaruh interlocking board dan firm performance untuk 101 perusahaan besar

di Belanda dengan menggunakan new panel database (Cai et al. 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa interlocks memiliki pengaruh negative terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Phan et al. (2003) mempunyai tujuan untuk mengetahui kegunaan dari interlocking directorate antara perusahaan pada pemerintahan di Negara berkembang. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara interlocking directorate dan kinerja perusahaan. Temuan lain terkait pengaruh status interlock dengan kinerja perusahaan juga ditemukan oleh beberapa peneliti (Sanchez dan Barroso-Castro 2015, Kim 2013, Pombo dan Guterrez 2011, Thorgren et al. 2010).

Connelly dan Slyke (2012) mengemukakan bahwa dewan direksi dan komisaris yang berstatus interlock dapat menjadialat yang penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi strategi khusus. Salah satu aspek penting dari status interlock adalah memungkinkan perusahaan untuk mengamati perilaku perusahaan lain dan mengurangi ketidakpastian terkait dengan inisiatif, strategis, komplikasinya, kinerja perusahaan dapat dimonitor dengan baik oleh dewan komisaris.

Interlock directorate merupakan salah satu indikasi terjadinya praktik monopoli, namun bukan berarti hal tersebut benar-benar terjadi. KPPU berpendapat bahwa maraknya praktik kartel di Indonesia diakibatkan oleh hukuman berupa denda yang relative rendah, hanya dua puluh lima milyar rupiah, sementara keuntungan yang diperoleh dapat mencapai trilyunan rupiah. Oleh karena itu, peneliti merasa tidak heran jika banyak perusahaan atau pengusaha di Indonesia yang berani melakukan praktik haram ini.

Indikasi praktik monopoli menurut KPPU adalah: (1) perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau

pesaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoly, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, (2) kegiatan yang dilarang yaitu melakukan control produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, (3) posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Sulitnya deteksi praktik monopoli juga disebabkan karena tindakan terhadap praktik monopoli harus didukung oleh fakta hukum. Benturan antar regulasi juga menjadi penyebab tidak mudahnya memberantas praktik-praktik monopoli. Investigasi selama lebih dari 10 tahun pada perusahaan public di Indonesia menunjukkan adanya konsistensi hasil status interlock directorate 26% berbasis dewan direksi dan 49.7% berbasis dewan komisaris.

SIMPULAN

Pasal 26 UU No. 5 tahun 1999, rangkap jabatan bukan sesuatu yang dilarang, namun kondisi tersebut dilarang

bilamana komisaris atau direktur memegang jabatan yang sama apabila: beroperasi pada pasar yang sama, memiliki keterkaitan bisnis satu sama lainnya dalam produksi (industri hulu hilir), menguasai pangsa pasar barang atau jasa secara bersama, dan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Deteksi terhadap kondisi tersebut tidak mudah dilakukan bila tidak diketahui status *interlocking* pada jabatan dewan komisaris atau direktur. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa diperlukan suatu model analisis yang mampu menyajikan status interlocking tersebut.

Hasil investigasi menemukan 49.7% perusahaan public di Indonesia berstatus interlock berbasis dewan komisaris. Hal ini berarti 49.7% perusahaan terindikasi/terdeteksi tidak mematuhi peraturan KPPU mengenai larangan rangkap jabatan.

Banyak aspek dan bukti yang mendukung secara hukum untuk dapat menentukan adanya praktik monopoli. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai early warning terkait praktik monopoli di Indonesia. Informasi tentang interlocking directorate dapat diakses pada www.interlockdirectorate.com sebagai bahan untuk penelitian berikutnya dan menjadi masukan penting bagi KPPU terkait dengan rangkap jabatan.

Jamal - Satu Dekade

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scilit.net

Internet Source

4%

2

blog.fferiyanto.com

Internet Source

3%

3

www.researchgate.net

Internet Source

3%

4

repository.stieykpn.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%